

ANALISIS PROYEKSI SETORAN DIVIDEN BUMN KEPADA NEGARA TAHUN 2024

16

Lisnawati*

Abstrak

Target dividen tahun 2024 mencapai 80,2 triliun. Jumlah ini tidak berubah dari dividen yang go public disetor pada tahun 2023. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi setoran dividen, antara lain: laba perusahaan, kebijakan dividen, kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, kebutuhan modal, dan peraturan perundang-undangan. Pada tahun ini OJK akan mengatur mengenai kewajiban bank dalam pembayaran dividen. Hal ini tentu akan berdampak pada setoran dividen tahun 2024. Selain itu penurunan harga komoditas juga akan memengaruhi setoran dividen. Tulisan ini menganalisis proyeksi setoran dividen tahun 2024. Target yang terlalu tinggi akan memengaruhi anggaran negara dan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk pembangunan dan program pemerintah. Terkait hal ini Komisi VI DPR RI dapat mengawasi kinerja BUMN ke depannya. Penetapan dividen harus dilakukan secara realistis agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan membebani BUMN itu sendiri. Pemerintah harus berhati-hati menetapkan target dividen. Target yang terlalu tinggi dapat membebani BUMN dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian negara.

Pendahuluan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan dividen yang disetor BUMN untuk negara mencapai Rp80,2 triliun pada 2024. Jumlah ini diketahui tidak berubah dari dividen yang go public disetor pada 2023. Perinciannya, setoran dividen dari BUMN diharapkan mampu mencapai Rp53,7 triliun, sedangkan dari perusahaan berstatus privat sebesar Rp26,5 triliun (market.bisnis.com, 11 Juli 2023).

Menurut Erick Thohir target dividen tersebut cukup berat dengan banyaknya tekanan global serta penurunan harga komoditas tahun ini. Inflasi yang terjadi di sejumlah negara menyebabkan rantai pasok terganggu. Kondisi ini akan memengaruhi pendapatan perusahaan, termasuk BUMN. Namun Erick Thohir masih optimistik bahwa dividen yang diberikan BUMN akan sama dengan dividen BUMN tahun 2023 (katadata.co.id, 15 Juni 2023).



9 772088 235001

* Analis Legislatif Ahli Muda, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan (Ekkuinbang) Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e-mail: lisnawati@dpr.go.id.

Sedangkan menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melihat ke depan, setoran dividen BUMN tahun 2024 akan menurun (nasional.kontan.co.id, 9 Agustus 2023). Terdapat beberapa tantangan yang dialami BUMN ke depan. Kondisi perekonomian dapat memengaruhi target setoran dividen BUMN kepada negara pada tahun 2024. Dampak pandemi Covid-19 juga turut memengaruhi kinerja keuangan BUMN, khususnya pendapatan perusahaan. Tulisan ini akan menganalisis mengenai proyeksi setoran dividen 2024.

Penentuan Besaran Setoran Dividen BUMN

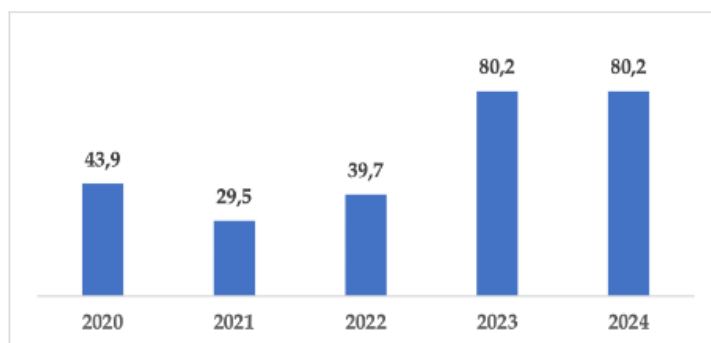
Setoran dividen BUMN merupakan pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan BUMN kepada negara. Dividen merupakan bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham, termasuk negara dalam hal ini sebagai pemegang saham mayoritas BUMN.

Jumlah dividen BUMN yang disetorkan kepada negara sejak tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 1. Terlihat bahwa setoran dividen mengalami kenaikan yang drastis pada tahun 2023.

Untuk tahun 2024 setoran dividen ditargetkan sama dengan tahun 2023 berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah 2023, yaitu *revenue* sebesar 3000 triliun, *ebitda*¹ 600 triliun dan *net income* sebesar 250 triliun (Kementerian BUMN, 15 Juni 2023).

Cara BUMN menentukan besaran setoran dividen yang harus disetor ke negara dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa faktor dan langkah yang mungkin dilakukan oleh BUMN dalam menentukan besaran setoran dividen:

- a. Laba perusahaan: semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar setoran dividen yang dapat disetorkan kepada negara.
- b. Kebijakan dividen: kebijakan ini mencakup persentase laba yang akan dibagikan sebagai dividen dan persentase yang akan digunakan untuk reinvestasi atau pengembangan perusahaan.
- c. Kinerja perusahaan: kinerja perusahaan BUMN, termasuk pertumbuhan pendapatan, efisiensi operasional, dan pengelolaan keuangan yang baik, dapat memengaruhi jumlah dividen yang akan dibagikan kepada negara.



sumber: Kementerian BUMN, 15 Juni 2023.

Gambar 1. Jumlah Dividen Periode 2020-2024 dalam Rp Triliun

¹ Ebitda adalah pendapatan perusahaan sebelum potongan bunga bank, pajak, depresiasi (penyusutan nilai asset) dan amortisasi.

- d. Kondisi ekonomi: kondisi perekonomian, termasuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar, dapat memengaruhi kinerja perusahaan BUMN dan pendapatan yang dihasilkan, sehingga berpotensi memengaruhi setoran dividen.
- e. Kebutuhan modal: BUMN juga perlu mempertimbangkan kebutuhan modal untuk pengembangan bisnis dan investasi jangka panjang.
- f. Peraturan perundang-undangan: BUMN juga akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang setoran dividen BUMN. Misalnya, Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur tentang distribusi dividen BUMN.

Pemerintah dalam menetapkan target dividen BUMN harus melalui berbagai mekanisme dan strategi. Berikut adalah beberapa cara pemerintah menetapkan target dividen BUMN, antara lain: *pertama*, kesepakatan pemerintah dengan DPR RI untuk menetapkan target setiap tahun. *Kedua*, pemerintah melakukan evaluasi kinerja BUMN dan merencanakan target dividen berdasarkan kinerja keuangan perusahaan. Evaluasi ini mencakup analisis laba, pertumbuhan pendapatan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi setoran dividen.

Ketiga, pemerintah memasukkan target dividen sebagai bagian dari Key Performance Indicator (KPI) perusahaan BUMN. Hal ini mendorong BUMN untuk mencapai target dividen dengan meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional. Dan *keempat*, pertimbangan faktor eksternal. Pemerintah juga

mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dunia, stabilitas pasar, dan kebutuhan negara dalam menetapkan target dividen BUMN. Faktor ini dapat memengaruhi kebijakan dan target dividen yang ditetapkan.

Pemerintah berupaya untuk menetapkan target dividen yang realistis dan sesuai dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan negara. Namun, target dividen juga dapat menjadi objek perdebatan dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak memberikan beban berlebih pada BUMN.

Analisis Proyeksi Setoran BUMN Tahun 2024

Sampai bulan Mei 2023 sejumlah perusahaan plat merah telah menyetorkan dividen kepada negara. Untuk perusahaan BUMN persero kontribusi dividen yang telah diberikan mencapai 29,97 triliun dengan rincian:

- a. PT Pertamina (Persero) memberikan dividen sebesar Rp13,51 triliun;
- b. Holding BUMN Pertambangan atau PT Indonesia Asahan Aluminium (MIND) dengan nominal dividen Rp7,45 triliun;
- c. PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai Rp5,0 triliun;
- d. PT PLN (Persero) mencapai Rp2,18 triliun;
- e. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Rp1,37 triliun;
- f. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rp127 miliar;
- g. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Rp101 miliar;
- h. Perum Perhutani senilai Rp99 miliar; dan
- i. PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp70 miliar.

Untuk perusahaan BUMN Tbk, dividen yang diberikan mencapai Rp50,20 triliun. BUMN berstatus Tbk yang memberi kontribusi terhadap dividen tahun ini, mayoritas dari sektor perbankan yang tergabung dalam perhimpunan bank milik negara (Himbara), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Selanjutnya, BUMN yang berstatus Tbk pemberi kontribusi untuk dividen tahun 2023 adalah PT Telkom Indonesia Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, dan PT Jasa Marga Tbk (perhutani.co.id, 8 Mei 2023).

Dividen yang sangat besar yang disetor oleh bank-bank BUMN bisa jadi tak terulang untuk tahun 2024, mengingat ada beberapa kondisi yang menyebabkan pertumbuhan laba tak setinggi tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur kewajiban bank untuk memiliki kebijakan pembayaran dividen, sebab OJK mencermati rasio dividen (*dividend payout ratio*) yang diberikan oleh industri perbankan kepada pemegang saham terlalu besar. Kebijakan dividen bank nantinya akan memuat antara lain pertimbangan bank (internal dan eksternal) dalam menetapkan besaran pembagian dividen, yang juga secara proporsional mempertimbangkan kepentingan bank dan kepentingan para pemegang saham (investor), termasuk memuat mekanisme persetujuan dan kewenangan yang diperlukan (cnbcindonesia.com, 8 Agustus 2023).

Selain adanya pengaturan kebijakan pembayaran dividen

oleh OJK, setoran dividen diproyeksikan akan turun di 2024 dikarenakan harga komoditas mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia mengalami kontraksi -2,75% pada Kuartal II-2023. Penurunan tren komoditas di pasar global akan berpengaruh terhadap penurunan nilai ekspor beberapa komoditas ekspor Indonesia dari sisi nilai batu bara, CPO, dan besi baja (finance.detik.com, 7 Agustus 2023).

Penutup

Setoran dividen BUMN merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Jika target dividen terlalu tinggi dan tidak tercapai, maka pendapatan negara dari sektor BUMN akan berkurang. Hal ini dapat memengaruhi anggaran negara dan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk pembangunan dan program pemerintah. Selain itu setoran dividen yang tidak tercapai dapat memengaruhi stabilitas keuangan negara. Pendapatan negara yang berkurang dapat memengaruhi kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban keuangan, seperti pembayaran utang atau pembiayaan program penting. Oleh karena itu penting bagi pemerintah dan BUMN untuk melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan stabilitas keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan penetapan dividen harus memperhatikan kondisi internal perusahaan dan faktor eksternal lain, seperti kebijakan yang dikeluarkan lembaga lain, kondisi ekonomi

global, dan stabilitas negara. Setoran dividen tahun 2024 diproyeksi akan mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan OJK dan penurunan harga komoditas di dunia. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dan langkah strategis lain guna mengantisipasi hal tersebut. Penurunan setoran dividen akan menurunkan pendapatan negara. Hal ini akan memengaruhi kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban keuangan. DPR RI melalui Komisi VI perlu terus mengawasi kinerja BUMN ke depannya. Penetapan dividen harus dilakukan secara realistis agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan tentunya akan membebani BUMN itu sendiri.

Referensi

"4 Fakta Menarik Dividen BUMN Tahun 2023, Nomor 2 Kontributor Terbesar", 8 Mei 2023, [perhutani.co.id](https://www.perhutani.co.id), <https://www.perhutani.co.id/4-fakta-menarik-dividen-bumn-tahun-2023-nomor-2-kontributor-terbesar/>, diakses 9 Agustus 2023.

"Ada Banyak Tantangan, Setoran Dividen BUMN Berpeluang Turun pada 2024", nasional.kontan.co.id, 9 Agustus 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-banyak-tantangan-setoran-dividen-bumn-berpeluang-turun-pada-2024>, diakses 10 Agustus 2023.

"Ekspor RI Minus, Pesta 'Durian Runtuh' Harga Komoditas Resmi Habis", finance.detik.com, 7 Agustus 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6863176/ekspor-ri-minus- pesta-durian-runtuh-harga-komoditas-resmi-habis>, diakses 10 Agustus 2023.

"Erick Thohir Bidik Dividen BUMN 2024 Capai Rp80 Triliun, Realistis?", market.bisnis.com, 11 Juli 2023, <https://market.bisnis.com/read/20230711/192/1673801/erick-thohir-bidik-dividen-bumn-2024-capai-rp80-triliun-realistic>., diakses 8 Agustus 2023.

"Erick Thohir Targetkan Emiten BUMN Setor Dividen Rp 53,7 T pada 2024", katadata.co.id, 15 Juni 2023, <https://katadata.co.id/tiakomalasari/finansial/648af732b88cb/erick-thohir-targetkan-emiten-bumn-setor-dividen-rp-53-7-t-pada-2024>, diakses 7 Agustus 2023.

"OJK Mau Atur Dividen Jumbo Perbankan, Big Bank RI Buka Suara", [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com), 8 Agustus 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230808112000-17-461065/ojk-mau-atu r-dividen-jumbo-perbankan-big-bank-ri-buka-suara>, diakses 9 Agustus 2023.

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, 15 Juni 2023.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.